

OMBUDSMAN: SURAT STAFSUS KE CAMAT MALADMINISTRASI, JOKOWI HARUS TINDAK

Selasa, 14 April 2020 - Gosanna Oktavia Harianja

Staf Khusus Presiden Jokowi Bidang Ekonomi dan Keuangan, Andi Taufan Garuda Putra, membuat surat kepada camat seluruh Indonesia, meminta dukungan kerja sama melawan desa PT Amarta melawan COVID-19.

PT Amarta Mikro Fintek, perusahaan milik Andi Taufan, disebut menerima komitmen Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk menjadi relawan desa di area Jawa, Sulawesi, dan Sumatera.

Anggota Ombudsman, Alvin Lie, menyebut tindakan itu sebagai maladministrasi karena melampaui kewenangan.

"Mencermati peristiwa stafsus presiden membuat surat keluar kepada camat menggunakan kop Sekretariat Negara, saya selaku anggota Ombudsman menilai ini merupakan suatu tindakan terindikasi maladministrasi," ucap Alvin, Selasa (14/4).

Maladministrasi dimaksud karena stafsus tidak punya kewenangan eksekutif apalagi membuat surat keluar. Stafsus boleh mencari info untuk disampaikan kepada presiden, tapi tidak menyurati camat maupun instansi lain tentang perusahaan untuk melakukan pendataan dan lain-lain.

"Kedua, tindakan tersebut merupakan maladministrasi karena melampaui kewenangan. Ketiga, ada potensi konflik kepentingan karena perusahaan yang dimaksud oleh stafsus tersebut dalam surat kepada camat, di mana stafsus punya peran di sana (CEO Amarta)," bebernya.

Maladministrasi lain soal kop surat Stafsus menggunakan kop Sekretariat Negara. "Ini sudah pelanggaran berat karena Setneg adalah lembaga negara dan stafsus bukan pejabat berwenang menggunakan kop surat Setneg," kritiknya.

Dia meminta Presiden Jokowi menindak stafsus yang berbuat maladministrasi tersebut.

"Untuk surat ini harus ada tindakan tegas terhadap stafsus yang menyalahgunakan kewenangannya, melampaui kewenangannya melakukan tindakan administrasi," ucapnya.